



2026

RENCANA KERJA

BPKPAD



@bpkpadtemanggung



bpkpad.temanggungkab.go.id



@Bpkpad Temanggung



bpkpad@temanggungkab.go.id

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI**RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

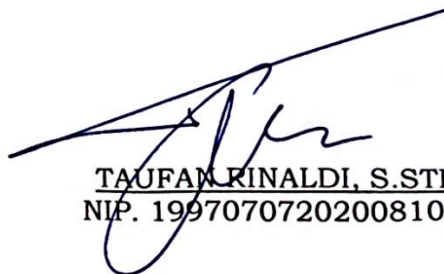
Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator

PETUGAS VERIFIKATOR

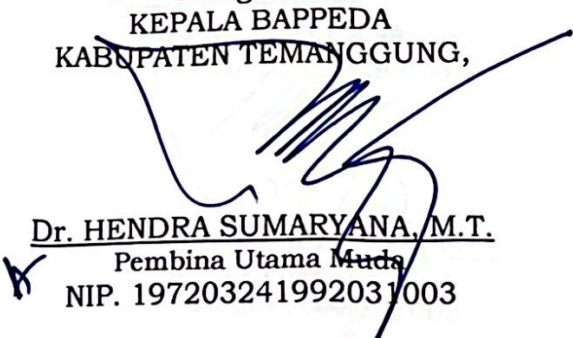


EWIEK KHAVIDA, S.STP,M.M.
NIP. 198311182002122001



TAUFAN RINALDI, S.STP.
NIP. 199707072020081003

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenanNya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan.

Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perangkat daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2026. Adapun tujuan dari disusunnya Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2026;

Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas - tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,



TRI WINARNO, SE., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197310201999031005

DAFTAR ISI

COVER.....i

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 7

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2023..... 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2023 dan Capaian
Renstra BPKPAD Tahun 2024-2026 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKPAD 39

2.3. Data Pokok..... 44

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD 74

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD 75

2.6. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 86

2.7. Inovasi Perangkat Daerah..... 86

2.8. Penghargaan 87

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 88

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 88

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung 88

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 92

4.1. Program dan Kegiatan 92

BAB V PENUTUP 106

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusi pada BPKPAD..... 11

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2024..... 13

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Triwulan II tahun 202528

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BPKPAD Triwulan II Tahun
2025 (Laporan IKPD).....40

Tabel 2. 4 Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan
Daerah Daerah Tahun 2020-202545

Tabel 2. 5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan II Tahun 202545

Tabel 2. 6 REALISASI APBD TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 202546

Tabel 2. 7 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019-202447

Tabel 2. 8 Indeks Dimensi Pengakolasian Anggaran Belanja Dalam APBD48

Tabel 2. 9 Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD48

Tabel 2. 10 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran
202450

Tabel 2. 11 Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Kabupaten
Temanggung Tahun 2019-202351

Tabel 2. 12 Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020
s.d 2025.....51

Tabel 2. 13 Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2020-2025....52

Tabel 2. 14 Penerbitan SP2D Tahun 202453

Tabel 2. 15 Rekapitulasi Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu Per Bulan Pada
tahun 2024 Triwulan I.....56

Tabel 2. 16 Cakupan Rekonsiliasi *Data* Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun
202457

Tabel 2. 17 Rincian jumlah BA yang dibuat pada Triwulan II Tahun 202558

Tabel 2. 18 Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang
Tepat Waktu59

Tabel 2. 19 Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang
Tepat Waktu59

Tabel 2. 20 Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di
satruan kerja tahun 2020-2025.....60

Tabel 2. 21 Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel TA 2025
triwulan II.....60

Tabel 2. 22 Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Tahun 2020-2025.....64

Tabel 2. 23 Data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2025.....65

Tabel 2. 24 Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah65

Tabel 2. 25 Data Jumlah Objek Pajak Tahun 2024-2025 Triwulan II.....66

Tabel 2. 27 Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu
Tahun 2020-202568

Tabel 2. 28 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2025
.....69

Tabel 2. 29 Persentase Realisasi terhadap target Pajak Daerah tahun 2020-2025
triwulan II.....70

Tabel 2. 30 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 Triwulan II70

Tabel 2. 31 Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2020-
202571

Tabel 2. 32 Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2024.....72

Tabel 2. 33 Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat Tahun 2019-2024
Triwulan II74

Tabel 2. 34 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 202677

Tabel 2. 35 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat86

Tabel 2. 36 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 202286

Tabel 2. 37 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun
2019-202487

Tabel 4. 1 Rencana Program dan Kegiatan BPKPAD Tahun 2026..... 96

Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan tahun 2026.....91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

Gambar 2.1 Cek List Kelengkapan Dokumen SPM LS untuk Barang/Jasa/
modal/BTL Non Belanja Pegawai 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja.

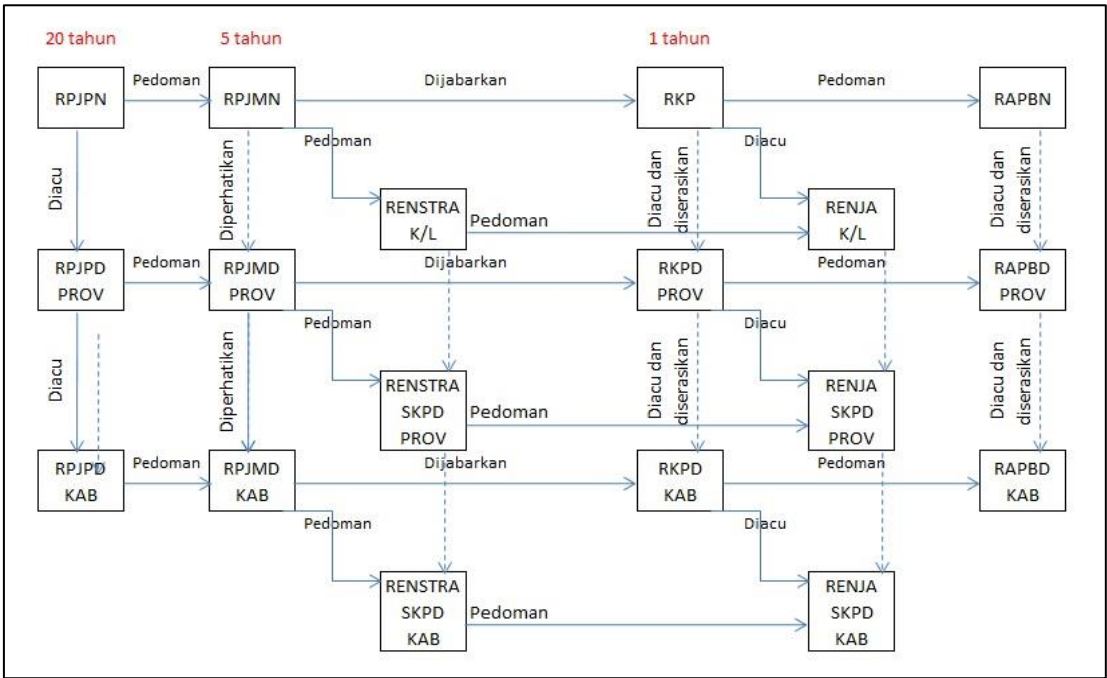
Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang juga merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 2. Kondisi pelayanan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ;
- 4. Data Pokok Pembangunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

5. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
6. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
7. Informasi lain terkait pelayanan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Analisis Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dan perkiraan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

c. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Lalu Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya, serta capaian

kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan Tujuan Dan Sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

g. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan Kegiatan Prioritas Dan Strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Dengan Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026.

1.4. Sumber Daya Manusia

Tabel I. 1
Sumber Daya Manusi pada BPKPAD

Pendidikan	Jumlah		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Sarjana	14	10	24
Pasca Sarjana	6	7	13
Diploma III	8	15	23
SMA	6	1	7
Jumlah	34	33	67

Sumber : BPKPAD, 2025

Berdasarkan data diatas, sumber daya manuasia pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah berjumlah 67 Orang terdiri dari 34 laki-laki dan 33 perempuan, terdapat keseimbangan yang cukup baik antara laki-laki dan perempuan dalam hal jumlah pegawai. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi partisipasi kerja, organisasi telah menunjukkan penerapan prinsip pengarusutamaan gender yang cukup merata.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	PENUTUP

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun.**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 terhadap capaian renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025 Triwulan II.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2024 dan Triwulan II tahun 2025 terhadap target di tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2024-2026. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKPAD TAHUN 2024

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah				1.994.849.700	1.650.381.000		63.320.116		190.978.155		389.164.035		707.975.808		1.351.438.114		81,89
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100			100		100		100		100		100		100	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100			100		100		100		100		100		100	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100			100		100		100		100		100		100	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	%	100			100		100		100		100		100		100	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100			100		100		100		100		100		100	
5.02.02. 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				554.350.000	521.350.000		10.552.555		74.294.990		139.663.300		157.717.386		382.228.231		73,32
5.02.02. 2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Doku men	2	57.600.000	57.600.000	0	831.000	1	131.000	1	4.944.550	0	28.243.100	2	34.149.650	100	59,29
5.02.02. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Doku men	2	41.750.000	41.750.000	0	544.500	1	612.000	1	13.617.450	0	7.113.775	2	21.887.725	100	52,43
5.02.02. 2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Doku men	2	235.000.000	216.000.000	0	6.284.055	2	70.572.990	0	6.287.340	0	100.578.301	2	183.722.686	100	85,06

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.02. 2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Doku men	2	220.000.000	206.000.000	0	2.893.000	0	2.979.000	2	114.813.960	0	21.782.210	2	142.468.170	100	69,16
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	
5.02.02. 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				764.999.700	382.216.000		29.389.915		103.586.195	309	45.845.645		135.329.172, 00		314.150.927		82,19
5.02.02. 2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Doku men	1236	764.999.700	382.216.000	309	29.389.915	309	103.586.195	309	45.845.645	309	135.329.172	1.23 6	314.150.927	100	82,19
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.02. 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				675.500.000	746.815.000		23.377.646		13.096.970		203.655.090		414.929.250,00		655.058.956		87,71
5.02.02. 2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	235.000.000	235.000.000	2	15.809.500	0	5.240.250	0	192.451.940	0	100.000	2	213.601.690	100	90,89

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.02. 2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, asistensi dan monitoring penyusunan laporan keuangan dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	Orang	1236	440.500.000	511.815.000	309	7.568.146	309	7.856.720	309	11.203.150	309	414.829.250	1.236	441.457.266	100	86,25
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.215.148.000	1.251.100.400		34.746.415		31.091.845		399.310.810		667.271.320		1.132.420.390,00		90,51
		Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100			100		100		100		100		100,00		100	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	80			97,10		97,38		98		100		100,00		100	
502.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			90,62	1.215.148.000	1.251.100.400		34.746.415		31.091.845		399.310.810		667.271.320		1.132.420.390		90,51
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	25.500.000	15.000.000	0	0	1	0	1	342.000	0	10.146.950	2	10.488.950	100	69,93
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1236	1.099.648.000	1.179.949.400	309	34.746.415	309	29.837.095	309	397.092.810	309	610.760.220	1.236	1.072.436.540	100	90,89

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.03. 2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtangan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Doku men	412	90.000.000	56.151.000	103	0	103	1.254.750	103	1.876.000	103	46.364.150	412	49.494.900	100	88,15
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				710.187.000	763.301.000		97.784.245		81.298.579		151.045.065	12	305.925.679		636.053.568		83,33
		persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	8,00			2,09		2		5		5		4,57		57,1 0	
		persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100			100		100		100		100		100, 00		100	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	95			14,39		35		76		98		98,16		100	
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	%	100			100		100		100		100		100,00		100	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				710.187.000	763.301.000		97.784.245		81.298.579		151.045.065		305.925.679		636.053.568		83,33
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak , Subjek Pajak,dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	375.000.000	305.605.500	3	42.022.915	3	44.036.770	3	48.294.270	3	88.085.620	12	222.439.575	100	72,79

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.04. 2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lapor an	12	258.000.000	360.000.000	3	44.823.275	3	25.400.019	3	87.231.455	3	186.329.920	12	343.784.669	100	95,50
5.02.04. 2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Doku men	12	23.093.000	26.239.500	3	1.921.750	3	3.035.750	3	4.746.000	3	8.305.750	12	18.009.250	100	68,63
5.02.04. 2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Doku men	12	54.094.000	71.456.000	3	9.016.305	3	8.826.040	3	10.773.340	3	23.204.389	12	51.820.074	100	72,52
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		
							I		II		III		IV						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				25.834.793.306	18.572.100.882		3.587.213.242		4.622.962.490		4.144.104.917		5.304.755.833		17.659.036.482		95,08	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan				24.812.793.306	17.341.629.382		3.420.084.245		4.425.621.501		3.947.334.817		4.781.525.513		16.574.566.076		95,58	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	8.036	24.812.793.306	17.341.629.382	8036	3.420.084.245	8.036	4.425.621.501	8036	3.947.334.817	8036	4.781.525.513	8.036	16.574.566.076	100	95,58	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat Tinggi		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					46.560.000		-		-		-		38.133.000		38.133.000		81,90	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	-	30.560.000	0		0		0		0	4	22.533.000	4	22.533.000	67	73,73

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.01. 2.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	-	16.000.000	0		0		0	0	2	15.600.000	2	15.600.000	100	97,50
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	83,33	
																Predikat	Sangat Tinggi	
5.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				190.000.000	168.000.000		13.499.500		22.301.994		27.366.897		57.620.330		120.788.721		71,90
5.02.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	11.000.000	3	201.000	3	170.000	3	2.893.500	3	6.518.070	12	9.782.570	100	88,93
5.02.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.000.000	35.000.000	3	342.800	3	1.658.600	3	4.283.947	3	22.237.360	12	28.522.707	100	81,49

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	15.000.000	3	638.000	3	891.000	3	2.903.500	3	3.844.000	12	8.276.500	100	55,18
5.02.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapor an	12	80.000.000	47.000.000	3	2.804.200	3	2.512.000	3	2.469.350	3	6.647.650	12	14.433.200	100	30,71
5.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	12	50.000.000	60.000.000	3	9.513.500	3	17.070.394	3	14.816.600	3	18.373.250	12	59.773.744	100	99,62
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	
5.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				622.000.000	622.000.000		142.560.307		144.704.355		139.317.503		151.904.723		578.486.888,00		93,00

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapor an	12	2.000.000	2.000.000	3	0	3	0	3	0	3	0	12	-	100	-
5.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	12	230.000.000	230.000.000	3	53.814.455	3	50.925.438	3	48.438.941	3	55.621.803	12	208.800.637	100	90,78
5.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	12	390.000.000	390.000.000	3	88.745.852	3	93.778.917	3	90.878.562	3	96.282.920	12	369.686.251	100	94,79
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	
5.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210.000.000	393.911.500		11.069.190		30.334.640		30.085.700		275.572.267		347.061.797		88,11

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.02.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	51	85.000.000	127.911.500	51	9.097.190	51	18.607.140	51	19.603.900	51	70.795.700	51	118.103.930	100	92,33
5.02.01. 2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	2	50.000.000	185.000.000	2	475.000	2	4.000.000	2	1.396.500	2	174.080.579	2	179.952.079	100	97,27
5.02.01. 2.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	45	25.000.000	25.000.000	45	605.000	45	0	45	744.600	45	5.008.000	45	6.357.600	100	25,43
5.02.01. 2.09.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	919	50.000.000	56.000.000	919	892.000	919	7.727.500	919	8.340.700	919	25.687.988	919	42.648.188	100	76,16

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
							I		II		III		IV					
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi																
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	
JUMLAH					29.754.978.006	22.236.883.282		3.783.064.018		4.926.331.069		5.083.624.827		6.985.928.640		20.778.948.554		93,44
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH							98,33	
																PREDIKAT	Sangat Tinggi	
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH							96,10	
																PREDIKAT	Sangat Tinggi	

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Triwulan II tahun 2025

BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II					
KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program pengelolaan keuangan daerah				1.994.849.700	984.382.000		24.443.011		62.972.451		87.415.462		8,88
	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100			100		100		100		100	
	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100			100		100		100		100	
	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100			100		100		100		100	
	Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	%	100			100		100		100		100	
	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100			100		100		100		100	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				554.350.000	272.500.000		1.662.000		23.460.177		25.122.177		9,22
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	57.600.000	30.000.000	0	480.000	1	2.864.014	1	3.344.014	50	11,15
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	41.750.000	17.500.000	0	0	0	522.523	0	522.523	-	2,99

BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II					
KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	235.000.000	100.000.000	0	1.182.000	1	19.773.640	1	20.955.640	50	20,96
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	220.000.000	125.000.000	0	0	0	300.000	0	300.000	-	0,24
					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan						25		
					Predikat						Sangat Rendah		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				764.999.700	336.000.000		11.772.511		32.848.524		44.621.035		13,28
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1236	764.999.700	336.000.000	309	11.772.511	309	32.848.524	618	44.621.035	50	5,83
					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan						50		
					Predikat						Sangat Tinggi		

BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II					
KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				675.500.000	375.882.000		11.008.500		6.663.750		17.672.250		4,70
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	235.000.000	224.500.000	1	10.531.000	0	6.313.750	1	16.844.750	50	7,50
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, asistensi dan monitoring penyusunan laporan keuangan dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	Orang	1236	440.500.000	151.382.000	309	477.500	309	350.000	618	827.500	50	0,55
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	50,00	
											Predikat	Sangat Tinggi	

BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II					
KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.215.148.000	564.876.125		4.868.750		24.618.300		29.487.050		5,22
	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100			100		100		100		100	
	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	80			100		100		100		100	
Pengelolaan Barang Milik Daerah			90,62	1.215.148.000	564.876.125		4.868.750		24.618.300		29.487.050		5,22
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	25.500.000	14.516.500	0	0	1	0	1	-	50	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1236	1.099.648.000	486.644.625	309	4.718.750	309	23.218.300	618	27.937.050	50	5,74
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	412	90.000.000	63.715.000	836	150.000	836	1.400.000	1.672	1.550.000	100	2,43
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	66,67	
											Predikat	Sangat Tinggi	

BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II					
KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				710.187.000	791.448.200		16.827.400		43.256.564		60.083.964		7,59
	persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	9,00			76,62		76,62		76,62		100	
	persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100			100		100		100		100	
	persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	95,5			13,54		37,74		37,74		39,52	
	Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	%	100			100		100		100		100	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				710.187.000	791.448.200		16.827.400		43.256.564		60.083.964		7,59
Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	-	440.000.000	0	555.000	1	7.021.500	1	7.576.500	100	1,72
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak , Subjek Pajak,dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	375.000.000	95.000.000	3	11.807.000	3	22.226.500	6	34.033.500	50	35,82

BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II					
KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	258.000.000	205.000.000	3	821.400	3	9.667.314	6	10.488.714	50	5,12
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	23.093.000	23.093.000	3	1.510.000	3	2.077.000	6	3.587.000	50	15,53
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	54.094.000	28.355.200	3	2.134.000	3	2.264.250	6	4.398.250	50	15,51
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	50,00	
											Predikat	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				25.834.793.306	23.749.734.985		4.476.103.864		3.473.788.633		7.949.892.497		33,47
Administrasi Keuangan				24.812.793.306	22.380.891.785		4.178.260.861		3.292.200.328		7.470.461.189		33,38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	8.036	24.812.793.306	22.380.891.785	8036	4.178.260.861	8036	3.292.200.328	8.036	7.470.461.189	100	33,38
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
											Predikat	Sangat Tinggi	

BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II					
KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Administrasi Umum Perangkat Daerah				190.000.000	185.500.000		15.516.997		8.548.400		24.065.397		12,97
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	10.000.000	3	375.000	3	789.500	6	1.164.500	50	11,65
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.000.000	35.000.000	3	898.400	3	429.200	6	1.327.600	50	3,79
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	15.000.000	3	765.000	3	627.500	6	1.392.500	50	9,28
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	80.000.000	73.500.000	3	1.808.800	3	3.297.200	6	5.106.000	50	6,95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	50.000.000	52.000.000	3	11.669.797	3	3.405.000	6	15.074.797	50	28,99
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	50,00	
											Predikat	Sangat Tinggi	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				622.000.000	980.843.200		272.083.006		156.781.525		428.864.531		43,72

BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II					
KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	-	3	0	3	0	6	-	50	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	230.000.000	230.000.000	3	46.325.307	3	38.681.833	6	85.007.140	50	36,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	390.000.000	750.843.200	3	225.757.699	3	118.099.692	6	343.857.391	50	45,80
					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan						50,00		
						Predikat						Sangat Tinggi	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210.000.000	202.500.000		10.243.000		16.258.380		26.501.380		13,09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	51	85.000.000	80.000.000	51	9.491.000	51	10.444.980	51	19.935.980	100	24,92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	50.000.000	50.000.000	2	752.000	2	1.651.000	2	2.403.000	100	4,81

BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI 2025		CAPAIAN 2025	
PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II					
KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	45	25.000.000	25.000.000	12	0	12	887.400	45	887.400	100	3,55
Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	919	50.000.000	47.500.000	2	0	2	3.275.000	919	3.275.000	100	6,89
											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
											Predikat	Sangat Tinggi	
JUMLAH				29.754.978.006	26.090.441.310		4.522.243.025		3.604.635.948		8.126.878.973		31,15
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH							54,17	
												Sangat Tinggi	
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH							94,50	
					PREDIKAT							Sangat Tinggi	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Opini WTP atas LKPD
 - b. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah.
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
 - b. Persentase dokumen penganggaran tepat waktu
 - c. Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu
 - d. Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - e. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu
 - f. Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu
 - g. Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja
 - h. Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
 - i. Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah
 - j. Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - e. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - f. Penyusunan Standar Harga

- g. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - i. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - j. Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - k. Penagihan Pajak Daerah
 - l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
-
4. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
- a. Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah
- Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak pada tahun 2024 berpredikat "Tidak Tercapai" dengan capaian kinerja 57,20%. Pada tahun 2024, Realisasi kinerjanya adalah 4,57%. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan terdapat perbedaan indikator yang digunakan pada tahun 2023. Secara umum faktor ketidak tercapainya indikator ini adalah Masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru. Selain itu beberapa pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbagai pihak sehingga penerimaan pajak tidak bisa dipastikan sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah target pajak daerah. Sedangkan faktor pendorong dalam ketercapaian indikator ini adalah Pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara online melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB, dilakukannya pemutakhiran data objek pajak daerah, dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri.
5. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
- a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya .

Sub kegiatan ini tidak tercapai 100% yaitu dari target 4 hanya tercapai 2 dikarenakan terdapat pengadaan yang tidak jadi dilaksanakan yaitu pengadaan printer.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan predikat sangat tinggi yaitu dengan nilai **98,33%**.

Berdasarkan Tabel 2.2 Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Dari evaluasi Kinerja triwulan II ini pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 -2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel capaian IKPD berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BPKPAD Triwulan II Tahun 2025 (Laporan IKPD)
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2024	Target Kinerja			Realisasi s.d tw II tahun 2025	Capaian s.d TW II 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				2024	2025	2026			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	18,35	15,5	15,75	16	20,23	100	ST				
2	Opini BPK atas LKPD	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	ST				
3	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100	91	93	95	100	100	ST				
4	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	ST				
5	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	ST				
6	Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	%	100	100	100	100	100	100	ST				
7	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	ST				
8	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	ST				
9	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	100	80	80	85	100	100	ST				
10	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	57,1	8	9	10	76,62	100	ST				
11	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	ST				
12	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	100	95	95,5	96	37,74	39,52					SR
13	Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	ST				

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan skala nilai peringkat kinerja “Sangat Tinggi” terdiri dari :
 - a. Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
 - 1) Faktor Pendorong : Ketersediaan Anggaran yang berasal dari berbagai sumber
 - 2) Faktor Penghambat : pengalokasian belanja infrastruktur yang belum memenuhi kebutuhan daerah:
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu
 - 1) Faktor Pendorong : Sudah terjadwalnya tahapan penyusunan yang terinci sesuai ketentuan Kemendagri
 - 2) Faktor Penghambat : Keterlambatan Penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
 - c. Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu
 - 1) Faktor Pendorong : Kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan SPM
 - 2) Faktor Penghambat : SKPD tidak respon terhadap verifikasi dokumen pengajuan dan lebih bersifat pasif dan tidak konfirmasi dan tidak koordinasi dengan BPKPAD
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : peningkatan koordinasi dan konfirmasi dengan SKPD sehingga dokumen SP2D dapat diproses dan tidak mengalami keterlambatan pembayaran.
 - d. Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 1) Faktor Pendorong : Kecepatan tindak lanjut SKPD dalam pembuatan Rekonsiliasi
 - 2) Faktor Penghambat : SKPD Masih terdapat selisih terhadap hasil rekonsiliasi
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- e. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu
- 1) Faktor Pendorong : Komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk menyampaikan Laporan keuangan secara tepat waktu sejalan dengan ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 2) Faktor Penghambat : Faktor Sumber Daya Manusia, pada saat penyusunan LKPD, belum semua Perangkat Daerah menyelesaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu, sehingga menjadi penghambat dalam proses Penyusunan LKPD.
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Pemda mendorong Perangkat Daerah segera melaksanakan target kinerja sehingga penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dalam rangka penyusunan LKPD tepat waktu.
- f. Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu
- 1) Faktor Pendorong : Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah
 - 2) Faktor Penghambat : SDM SKPD, tidak adanya *knowledge transfer* antar pengurus barang yang lama dengan pengurus barang baru/pengganti.
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Menjalin koordinasi yang baik dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah lebih intensif dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah.
- g. Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja
- 1) Faktor Pendorong : Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah
 - 2) Faktor Penghambat : Beberapa aset belum termanfaatkan karena tarif berdasarkan nilai appraisal terlalu tinggi, Penyewa sudah tidak mampu lagi membayar terhadap harga yang ditentukan, kelompok tani yang menyewa lahan berhenti menyewa

- 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Evaluasi atas nilai appraisal yang telah berjalan, Sosialisasi terkait pemanfaatan tanah dan bangunan beserta tarifnya Kepada Masyarakat
- h. Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah
- 1) Faktor Pendorong :
 - Pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara online melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB, dilakukannya pemutakhiran data objek pajak daerah, dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri
 - Adanya jenis pajak daerah baru, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 sehingga mendorong peningkatam target pajak daerah
 - 2) Faktor Penghambat : Masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Melaksanakan pendataan objek pajak baru secara intensif, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melaksanakan sosialisasi pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan pelatihan
- i. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu
- 1) Faktor Pendorong : Tersedianya sistem aplikasi SIAP PAKDE sebagai alat untuk mengolah data pengajuan SKPD reklame dan air tanah, dan meningkatnya kesadaran WP badan (vendor) reklame.
 - 2) Faktor Penghambat : Masih ditemukan perbedaan antara izin yang diterbitkan oleh DPM dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame.
 - 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : Koordinasi dengan DPM dan Satpol PP terkait penyelenggaraan reklame agar tercipta sinkronisasi antara pajak dan izin reklame, dan dapat diketahui reklame yang telah terpasang namun belum berizin dan belum bayar pajak.

j. Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

- 1) Faktor Pendorong : Tingkat kesadaran perangkat daerah dalam melaporkan capaian pendapatan terbilang tinggi, disamping itu peran serta dari petugas dalam mengingatkan tentang kewajiban pelaporan pendapatan juga menjadi faktor pendukung suksesnya indikator ini.
- 2) Faktor Penghambat : pelaporan yang dilakukan tidak bisa diawal waktu, seringkali terjadi diatas tanggal 7 tiap awal bulannya. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di perangkat daerah terbatas dan bertumpuknya tugas yang lain membuat pelaporan tidak dapat dilakukan awal waktu
- 3) Rekomendasi Tindak Lanjut : pemantauan pengisian pelaporan Pendapatan Daerah oleh SKPD pengampu pendapatan

2. Capaian Indikator dengan skala nilai peringkat kinerja “Sangat Rendah” terdiri dari:

a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

- 1) Faktor Pendorong : Bertambahnya wajib pajak melalui kegiatan pendataan wajib pajak baru maupun melakukan update data atas ketetapan pajak tahun sebelumnya sehingga meningkatkan nominal pajak pada tahun 2025 ini dimana nantinya akan meningkatkan capaian realisasi penerimaan pajak daerah.
- 2) Faktor Penghambat :
 - pendaftaran dan pembayaran objek pajak Reklame dan BPHTB belum maksimal serta capaian pada triwulan II belum menggambarkan keseluruhan realisasi Pajak Daerah
 - PBB-P2 belum jatuh tempo sehingga realisasi dari PBB-P2 belum maksimal
 - Rekomendasi Tindak Lanjut : rutin melakukan sosialisasi tentang pajak daerah menggunakan beberapa platform digital yang tersedia.
 - Rekomendasi Tindak Lanjut : rutin melakukan sosialisasi tentang pajak daerah menggunakan beberapa platform digital yang tersedia

2.3. Data Pokok

Data Pokok pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari 1 (satu) jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Sasaran

a. **Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan**

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%

Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Daerah
Tahun 2020-2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	307.456.823.576	363.956.011.433	308.726.486.721	351.823.679.260	384.396.905.677	208.668.460.520
Realisasi Pendapatan Daerah	1.830.815.032.558	1.950.113.739.891	1.849.550.699.127	2.005.427.452.487	2.097.018.658.739	1.031.644.971.069
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	16,79	18,66	16,69	17,54	18,33	20,23

Sumber: BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Berdasarkan Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase perolehan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 tercapai sebesar 20,23%.

Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 terlihat meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena Pendapatan Transfer yang merupakan komponen penyusun Pendapatan Daerah selain PAD belum maksimal. Sehingga koefisien persentase perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah terlihat lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2. 5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan II Tahun 2025

Uraian	2025
Pendapatan Asli Daerah	208.668.460.520
I.A Hasil Pajak Daerah	52.238.282.602
I.B Hasil Retribusi Daerah	106.036.056.531
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	18.730.335.896
I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	31.663.785.491

Sumber: BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Tabel 2. 6
REALISASI APBD TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	208.668.460.520
PENDAPATAN TRANSFER	822.976.510.549
JUMLAH PENDAPATAN	1.031.644.971.069

Sumber: BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 nilai capaian realisasinya sudah merata antara pendapatan pajak, retribusi, maupun kekayaan daerah.

Faktor pendorong di indikator ini yakni mulai bertambahnya usaha lokal penyumbang PAD dan diharapkan di tahun berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan.

b. Opini BPK atas LKPD

Opini Laporan Keuangan Pemerintah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan

patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai Tahun 2023 atau selama 6 tahun terakhir (Penerimaan Opini di Tahun 2019-2024) memperoleh opini WTP. Atas opini yang sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah

- Komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan
- Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Upaya yang terus dilakukan :

- Melakukan monitoring laporan keuangan
- Melaksanakan asistensi kepada Perangkat Daerah

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

2. Indikator Kinerja Program

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen)di luar gaji;
 3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari penerimaan dana transfer umum; dan
 4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:
- Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.
 - Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Tabel 2. 8
Indeks Dimensi Pengakolasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks (D.2)
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	1	$\frac{1+1+1+1}{4}=1$	$=\frac{4}{4} \times 100 = 100$
Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji	1		
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	1		
Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal	1		

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Adapun data Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 9
Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Skor rata-rata tiap fungsi urusan	4	4	4	4	4	4

Pengalokasian anggaran	4	4	4	4	4	4
Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada APBD Triwulan II Tahun Anggaran 2025 untuk hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan. Secara rinci persentase pengalokasian anggarannya sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp737.242.233.726,00 atau sebesar 34,70% dari total belanja daerah sebesar Rp2.124.690.575.218,00;
2. Alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar Rp417.181.119.671,00 atau sebesar 27,89% dari total belanja daerah sebesar Rp1.495.688.845.557,00 di luar belanja gaji ASN;
3. Alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp480.205.200.378,00 atau sebesar 27,75% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan belanja transfer ke desa atau sebesar Rp1.730.388.068.344,00;
4. Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp36.744.335.825,00 atau sebesar 1,73% dari total belanja daerah sebesar Rp2.124.690.575.218,00.

Dari keempat poin di atas telah memenuhi minimal dari indikator berdasar tabel 2.8, sehingga skor rata-rata tiap fungsi urusan tahun 2025 sebesar 4 dengan predikat telah tercapai ketersediaan anggaran dari berbagai sumber.

Faktor pendorongnya adalah ketersediaan anggaran dari berbagai sumber sedangkan faktor penghambatnya adalah pengalokasian belanja infrastruktur yang belum memenuhi ketentuan. Dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan/tahun 2027. Dalam hal ini Proporsi Belanja Infrastruktur Kabupaten Temanggung 27,75%

dimana belum memenuhi sesuai dengan perundang-undangan dikarenakan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas.

b. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah menyebutkan secara jelas Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 10
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	REALISASI WAKTU PENYAMPAIAN
1	Penyampaian rancangan KUA PPAS 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II Bulan Juli 2024	11 Juli 2024 (Tepat Waktu)
2	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA PPAS	Paling lambat minggu II Bulan Agustus 2024	15 Agustus 2024 (Tepat Waktu)
3	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPASKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lambat minggu III bulan Agustus 2024	21 Agustus 2024 (Tepat Waktu)
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu III bulan September 2024	17 September 2024 (Tepat Waktu)
5	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 November 2024 (satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan)	18 November 2024 (Tepat Waktu)
6	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	Paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan Bersama	21 November 2024 (Tepat Waktu)
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling akhir 31 Desember 2024	23 Desember 2024 (Tepat Waktu)

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan dikali seratus persen. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 11
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu	6	7	3	7	7	7
Total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan	7	7	7	7	7	7
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	85,71	100	42,86	100	100	100

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua dokumen penganggaran untuk penetapan Tahun Anggaran 2025 disusun pada Tahun 2024 dan dapat dilaporkan bahwa semua dokumen dimaksud telah disusun dengan persentase dokumen penganggaran tepat waktu yaitu sebesar 100% atau predikat telah tercapai.

Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah telah terjadwalnya tahapan penyusunan yang terinci sesuai ketentuan Kemendagri. Sedangkan Secara lengkap dokumen penganganggaran sebagaimana dimaksud terinci pada tabel 2.12 berikut :

Tabel 2. 12
Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025

No	Dokumen Penganggaran	TAHUN ANGGARAN						%
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	V	V	X	V	V	V	
2	Kesepakatan KUA & PPAS	V	V	X	V	V	V	
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA	X	V	V	X	V	V	
4	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	X	X	V	X	V	V	
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	V	V	V	V	V	V	

6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	V	V	V	V	V	V	
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	V	V	V	V	V	V	

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Keterangan : V = Tepat waktu
X = Tidak tepat waktu
Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok ukurnya beda.

c. **Prosentase Penerbitan SP2D Online Yang Tepat Waktu.**

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) (sumber : Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Temanggung).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Temanggung.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%.

Penerbitan SP2D di Kabupaten Temanggung pada awal Desember 2021 telah menggunakan aplikasi SP2D online. Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 13
Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2020-2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total SP2D yang dicairkan tepat waktu (%)	8.566	8.757	9.411	8.837	10.409	3.291
Total SP2D yang diterbitkan (%)	8.566	8.757	9.411	8.837	10.409	3.291
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada

pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Faktor pendorong indikator ini adalah kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan SPM. Faktor penghambat yang mungkin terjadi adalah SKPD kurang responsif terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan, adanya sikap pasif dalam memenuhi kelengkapan berkas, dan kurangnya koordinasi antarpihak yang terkait.

Upaya yang terus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan SKPD sehingga dokumen SP2D dapat diproses dan tidak mengalami keterlambatan pembayaran.

Adapun data penerbitan SP2D Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14
Penerbitan SP2D Tahun 2024

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43	43
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52	52
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53	53
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	101	101
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	40	40
6	Bagian Hukum	12	12
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental	20	20
8	Bagian Organisasi	1	1
9	Bagian Pembangunan	11	11
10	Bagian Pemerintahan	4	4
11	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	17	17
12	Bagian Perekonomian	14	14
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	37	37
14	Bagian Umum	146	146
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50	50
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37	37
17	Dinas Kesehatan	98	98
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	92	92
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	92	92
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	78	78

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120	120
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46	46
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83	83
24	Dinas Penanaman Modal	50	50
25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	124	124
26	Dinas Perhubungan	61	61
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	56	56
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	64	64
29	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	134	134
30	Dinas Sosial	59	59
31	Inspektorat	31	31
32	Kecamatan Bansari	44	44
33	Kecamatan Bejen	44	44
34	Kecamatan Bulu	49	49
35	Kecamatan Candirotto	37	37
36	Kecamatan Gemawang	45	45
37	Kecamatan Jumo	41	41
38	Kecamatan Kaloran	44	44
39	Kecamatan Kandangan	40	40
40	Kecamatan Kedu	51	51
41	Kecamatan Kledung	52	52
42	Kecamatan Kranggan	46	46
43	Kecamatan Ngadirejo	41	41
44	Kecamatan Parakan	50	50
45	Kecamatan Pringsurat	40	40
46	Kecamatan Selopampang	40	40
47	Kecamatan Temanggung	44	44
48	Kecamatan Tembarak	41	41
49	Kecamatan Tlogomulyo	38	38
50	Kecamatan Tretep	41	41
51	Kecamatan Wonoboyo	40	40
52	Kelurahan Banyuurip	16	16
53	Kelurahan Butuh	19	19
54	Kelurahan Giyanti	25	25

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
55	Kelurahan Jampirejo	18	18
56	Kelurahan Jampiroso	24	24
57	Kelurahan Jurang	18	18
58	Kelurahan Kebonsari	18	18
59	Kelurahan Kertosari	18	18
60	Kelurahan Kowangan	19	19
61	Kelurahan Kranggan	20	20
62	Kelurahan Madureso	19	19
63	Kelurahan Manding	20	20
64	Kelurahan Manggong	19	19
65	Kelurahan Mungseng	19	19
66	Kelurahan Parakan Kauman	25	25
67	Kelurahan Parakan Wetan	19	19
68	Kelurahan Purworejo	20	20
69	Kelurahan Sidorejo	20	20
70	Kelurahan Temanggung I	27	27
71	Kelurahan Temanggung II	14	14
72	Kelurahan Tlogorejo	19	19
73	Kelurahan Walitelon Selatan	17	17
74	Kelurahan Walitelon Utara	13	13
75	Rumah Sakit Umum Daerah	59	59
76	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4	4
77	Sekretariat DPRD	88	88
	JUMLAH	3.291	3.291

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel 2.14, dapat diketahui bahwa terdapat 77 SKPD dengan pengajuan SPM sebanyak 3.291 dan menerbitkan SP2D sebanyak 3.291. Jadi, dari SPM yang diajukan, semuanya terbit SP2D.

Dalam proses pengajuan dan verifikasi berkas Surat Perintah Membayar (SPM) didasarkan pada cek list kelengkapan dokumen SPP-SPM yang sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Temanggung. Jika dalam pengajuan permohonan pembayaran terdapat berkas SPM yang tidak memenuhi syarat cek list sebagaimana yang telah tertuang di dalam

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Temanggung, maka berkas pengajuan dikembalikan ke SKPD untuk dilengkapi dan dilakukan perbaikan.

Gambar 2. 1
Cek List Kelengkapan Dokumen SPM LS untuk Barang/Jasa/modal/BTL Non Belanja Pegawai

CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS UNTUK BARANG/JASA/MODAL/BTL NON BELANJA PEGAWAI			
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	FORM SPP-LS		
2.	SALINAN DPA/DPPA YANG DIBERLAKUKAN SEBAGAI SPD		
3.	BILLING PAJAK TANDA TANGAN BENDAHARA DAN STEMPEL PD		
4.	SPK		
5.	SURAT KETERANGAN NO REK BANK PIHAK KETIGA/FOTOCOPY BUKU REKENING		
6.	BA PENYELESAIAN PEKERJAAN		
7.	BA SERAH TERIMA BARANG		
8.	BA PEMBAYARAN		
9.	KUITANSI BERMATERAI CUKUP		
10.	JAMINAN UANG MUKA		
11.	JAMINAN PEMELIHARAAN		
12.	BA PEMERIKSAAN PEKERJAAN		
13.	SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN DENDA KETERLAMBATAN		
14.	INVOICE		
15.	DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN		
16.	SPTJ PENYEDIA		
17.	SPTJ PPTK		
18.	SPTJ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
19.	SPTJ PA		
20.	NPHD		
21.	SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK PD		
PPK PD			
Nama Terang NIP.			

Tabel 2. 15
Rekapitulasi Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu Per Bulan Pada tahun 2024 Triwulan II

NO.	BULAN	SPM	SP2D TEPAT WAKTU
1	Januari	330	330
2	Pebruari	355	355
3	Maret	832	832
4	April	406	406
5	Mei	623	623
6	Juni	745	745
	Jumlah	3.291	3.291

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel 2.15 tidak terdapat perbedaan data antara pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu.

d. Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Penerimaan Kas adalah penerimaan yang diterima dalam masa waktu berjalan pada satu periode tertentu, penerimaan kas dianggap sah setelah BUD/Kuasa BUD menerima nota kredit atau Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lainnya yang sah yang telah divalidasi oleh Pemegang Kas Umum Daerah (Sumber: Peraturan

Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025). Sedangkan pengeluaran kas adalah pengeluaran guna membiayai belanja daerah berdasarkan DPA/DPPA-PD dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber: Peraturan Bupati Temanggung 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025).

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka RKUD pada bank umum yang sehat. Dalam hal ini, pemerintah menunjuk Bank Jateng selaku Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). (Sumber: Peraturan Bupati Temanggung 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025).

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dilakukan antara BUD yang memberi kuasa kepada Kuasa BUD dengan Bank Umum (Bank Jateng).

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah bertujuan sebagai proses pengendalian keuangan yang penting guna membantu memastikan saldo yang akurat dan keandalan laporan keuangan. Rumus Perhitungan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah: Jumlah Berita Acara (BA) Rekonsiliasi yang Disahkan dibagi dengan jumlah Berita Acara (BA) Rekonsiliasi per Bulan yang dibuat dikali 100%

Data jumlah penerimaan dan pengeluaran ini diambil dari BKU dan rekening koran yang telah dicatat oleh Kuasa BUD dan Bank Jateng. Pada akhir periode pelaporan, dilakukan rekonsiliasi data antara Kuasa BUD dan Bank Jateng. Sehingga menghasilkan dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Kas.

Berikut data Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2025:

Tabel 2. 16

Cakupan Rekonsiliasi *Data* Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah BA Rekon yang Dibuat	na	na	na	na	12	6

Jumlah BA yang Disahkan	na	na	na	na	12	6
Total	na	na	na	na	100%	100%

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Pada tabel 1.16 pada tahun 2025 Triwulan II terdapat 6 Berita Acara Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang ditandatangani oleh Kuasa BUD dan Bank Jateng. Sehingga, antara jumlah BA Rekonsiliasi yang dibuat dan jumlah BA Rekonsiliasi yang disahkan mencapai persentase 100%. Berikut rincian jumlah BA yang dibuat pada Triwulan II Tahun 2025:

Tabel 2. 17
Rincian jumlah BA yang dibuat pada Triwulan II Tahun 2025

No	BULAN	Jumlah BA Rekon yang Dibuat	Jumlah BA yang Disahkan	Persentase (%)
1	Januari	1	1	100%
2	Februari	1	1	100%
3	Maret	1	1	100%
4	April	1	1	100%
5	Mei	1	1	100%
6	Juni	1	1	100%
	Total	6	6	100%

Sumber: BPKPAD Kab Temanggung, 2025

e. **Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu**

Laporan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 *unaudited* telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret 2024, sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyampaikan LKPD Tahun 2023 secara tepat waktu.

Adapun Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Tepat Waktu tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18
Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Tepat Waktu

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab Temanggung yang dikirim Tepat Waktu	1	1	1	1	1	1
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	1	1	1	1	1	1
Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : BPKPAD, 2025

Tabel 2. 19
Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Tepat Waktu

Uraian	Waktu penyampaian	Realisasi Waktu Penyampaian	Keterangan
Penyampaian LKPD unaudited tahun 2024	LKPD TA 2024 disampaikan Paling Lambat 31 Maret 2025	26 Maret 2025	Tepat Waktu

Berdasarkan tabel 2.19 penyampaian LKPD Kabupaten Temanggung telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara tepat waktu karena disampaikan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Dan berdasarkan tabel 2.19 Untuk LKPD Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada 26 Maret 2025.

Faktor pendorong tercapainya indicator kinerja ini salah satunya adalah Komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk menyampaikan Laporan keuangan secara tepat waktu sejalan dengan ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan untuk faktor penghambatnya salah satunya adalah Faktor Sumber Daya Manusia, pada saat penyusunan LKPD, belum semua Perangkat Daerah menyelesaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu, sehingga menjadi penghambat dalam proses Penyusunan LKPD. Kedepannya, Pemda mendorong Perangkat Daerah segera melaksanakan target kinerja sehingga penyusunan

Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dalam rangka mencapai penyusunan LKPD yang tepat waktu.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

f. Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu

Barang Milik Daerah (BMD) dicatat dan dilaporkan sesuai asas-asas pengelolaan BMD, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMD tercermin dari pelaporan BMD secara periodik dan tepat waktu yang dimulai dari pencatatan dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mendagri nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembukuan dan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Adapun Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 20
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja tahun 2020-2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah satuan kerja yang tertib	137	142	103	103	103	103
Jumlah satuan kerja	168	168	103	103	103	103
Persentase (%)	81,55	84,52	100	100	100	100

Sumber Data: BPKPAD, 20255

Berdasarkan tabel di atas untuk Tahun 2025 II (April - Juni), 103 satuan kerja sudah tepat waktu dalam menyampaikan laporan Barang Milik Daerah, hal ini dikarenakan laporan Barang Milik Daerah dimaksud sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah Triwulan II Tahun 2025 untuk laporan MCSP KPK. Berikut ini daftar SKPD yang menyampaikan laporan daftar barang milik daerah tepat waktu:

Tabel 2. 21
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel TA 2025 triwulan II

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Apr	Mei	Juni	Apr	Mei	Juni
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	V	V	V			

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Apr	Mei	Juni	Apr	Mei	Juni
2	Dinas Kesehatan	V	V	V			
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V	V	V			
4	UPT Puskesmas Temanggung	V	V	V			
5	UPT Puskesmas Tlogomulyo	V	V	V			
6	UPT Puskesmas Tembarak	V	V	V			
7	UPT Puskesmas Selopampang	V	V	V			
8	UPT Puskesmas Pringsurat	V	V	V			
9	UPT Puskesmas Kranggan	V	V	V			
10	UPT Puskesmas Pare	V	V	V			
11	UPT Puskesmas Parakan	V	V	V			
12	UPT Puskesmas Traji	V	V	V			
13	UPT Puskesmas Bulu	V	V	V			
14	UPT Puskesmas Ngadirejo	V	V	V			
15	UPT Puskesmas Kaloran	V	V	V			
16	UPT Puskesmas Tepusen	V	V	V			
17	UPT Puskesmas Candiroto	V	V	V			
18	UPT Puskesmas Bejen	V	V	V			
19	UPT Puskesmas Bansari	V	V	V			
20	UPT Puskesmas Wonobojo	V	V	V			
21	UPT Puskesmas Tretep	V	V	V			
22	UPT Puskesmas Kedu	V	V	V			
23	UPT Puskesmas Kledung	V	V	V			
24	UPT Puskesmas Kandangan	V	V	V			
25	UPT Puskesmas Jumo	V	V	V			
26	UPT PuskesmasGemawang	V	V	V			
27	UPT Puskesmas Dharma Rini	V	V	V			
28	UPT Puskesmas Rejosari	V	V	V			
29	UPT Puskesmas Banjarsari	V	V	V			
30	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	V	V	V			
31	Dinas Sosial	V	V	V			
32	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	V	V	V			
33	DPPPAPP dan KB	V	V	V			
34	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	V	V	V			
35	DPRKPLH	V	V	V			
36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	V	V			
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V	V	V			
38	Dinas Perhubungan	V	V	V			

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Apr	Mei	Juni	Apr	Mei	Juni
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	V	V	V			
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	V	V	V			
41	Dinas Penanaman Modal	V	V	V			
42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	V	V			
43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V	V	V			
44	Inspektorat	V	V	V			
45	BAPPEDA	V	V	V			
46	BPKPAD	V	V	V			
47	BKPSDM	V	V	V			
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V	V	V			
49	Bagian Umum	V	V	V			
50	Bagian Prokopim	V	V	V			
51	Bagian Hukum	V	V	V			
52	Bagian Kesra	V	V	V			
53	Bagian Perekonomian	V	V	V			
54	Bagian Pembangunan	V	V	V			
55	Bagian Pemerintahan	V	V	V			
56	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	V	V	V			
57	Bagian Organisasi	V	V	V			
58	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V	V	V			
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V	V	V			
60	Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran	V	V	V			
61	Kecamatan Temanggung	V	V	V			
62	Kelurahan Temanggung I	V	V	V			
63	Kelurahan Temanggung II	V	V	V			
64	Kelurahan Butuh	V	V	V			
65	Kelurahan Jampiroso	V	V	V			
66	Kelurahan Jampirejo	V	V	V			
67	Kelurahan Kertosari	V	V	V			
68	Kelurahan Banyuurip	V	V	V			
69	Kelurahan Kowangan	V	V	V			

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Apr	Mei	Juni	Apr	Mei	Juni
70	Kelurahan Jurang	V	V	V			
71	Kelurahan Madureso	V	V	V			
72	Kelurahan Sidorejo	V	V	V			
73	Kelurahan Tlogorejo	V	V	V			
74	Kelurahan Kebonsari	V	V	V			
75	Kelurahan Manding	V	V	V			
76	Kelurahan Mungseng	V	V	V			
77	Kelurahan Purworejo	V	V	V			
78	Kelurahan Giyanti	V	V	V			
79	Kelurahan Walitelon Sel	V	V	V			
80	Kelurahan Walitelon Utara	V	V	V			
81	Kecamatan Tembarak	V	V	V			
82	Kecamatan Pringsurat	V	V	V			
83	Kecamatan Kaloran	V	V	V			
84	Kecamatan Parakan	V	V	V			
85	Kelurahan Parakan Wetan	V	V	V			
86	Kel Parakan Kauman	V	V	V			
87	Kecamatan Bulu	V	V	V			
88	Kecamatan Kedu	V	V	V			
89	Kecamatan Kandangan	V	V	V			
90	Kecamatan Candiroto	V	V	V			
91	Kecamatan Ngadirejo	V	V	V			
92	Kelurahan Manggong	V	V	V			
93	Kecamatan Jumo	V	V	V			
94	Kecamatan Wonobojo	V	V	V			
95	Kecamatan Kranggan	V	V	V			
96	Kelurahan Kranggan	V	V	V			
97	Kecamatan Bejen	V	V	V			
98	Kecamatan Kledung	V	V	V			
99	Kecamatan Bansari	V	V	V			
100	Kecamatan Tlogomulyo	V	V	V			

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Apr	Mei	Juni	Apr	Mei	Juni
101	Kecamatan Selopampang	V	V	V			
102	Kecamatan Gemawang	V	V	V			
103	Kecamatan Tretep	V	V	V			

Sumber Data: Bidang pengelolaan BMD Tahun 2023

g. Persentase Pemanfaatan Aset Di Satuan Kerja

Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pertimbangan “teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana penggunaan.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Adapun Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 22
Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Tahun 2020-2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	945	946	965	1.032	1070	863
Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan	1.200	1.200	1.094	1.094	1.070	863
Persentase (%)	78,75	78,83	88,20	94,33	100	100

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan sebesar 863 yang terdiri dari 861 bidang tanah dan 2 unit bangunan gedung. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2024 dikarenakan penyesuaian data potensi aset yang bisa dimanfaatkan dengan berpedoman pada Property Investasi (PI) Tahun 2024. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Temanggung akan meningkatkan sosialisasi terkait pemanfaatan tanah beserta tarifnya kepada masyarakat.

Dibandingkan Tahun 2024 pada Tahun 2025 tidak terdapat kenaikan pemanfaatan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain, hanya terdapat perbedaan jumlah aset dikarenakan penyesuaian dengan Property Investasi (PI). Jumlah pemanfaatan tahun 2025 sebesar 100%.

Adapun data aset tanah dan gedung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 23
Data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2025

Uraian	2025		
	Jumlah potensi aset	Jumlah Aset Yang sudah Dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang tidak Dimanfaatkan
Tanah	861	861	0
Bangunan	2	2	0
Jumlah	863	863	0

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Program Pendapatan Daerah

h. Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Penetapan target merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Target pajak daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pajak daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud peningkatan potensi target pajak daerah adalah selisih jumlah target pajak daerah tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan rumus persentase peningkatan potensi target pajak daerah adalah $\frac{\text{target pajak daerah tahun berkenaan} - \text{target pajak daerah tahun sebelumnya}}{\text{target pajak daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$. Realisasi persentase peningkatan target pajak daerah Tahun 2025 Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 24
Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah tahun 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Target Pajak Daerah	36.723.000.000	45.834.000.000	69.760.000.000	74.947.290.400	78.370.855.400	138.418.634.896
Peningkatan Target Pajak Daerah	-4.732.000.000	9.111.000.000	23.926.000.000	5.187.290.400	3.423.565.000	60.047.779.496
Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah ((n-1)-n)/(n-1)*100	-11,414%	24,81%	52%	7,44%	4.57%	76,62%

Sumber Data : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Adapun data jumlah objek pajak Tahun 2024 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 25
Data Jumlah Objek Pajak Tahun 2024-2025 Triwulan II

Uraian	2024	2025	Jumlah Peningkatan
Target Pajak Daerah	78.370.855.400	138.418.634.896	60.047.779.496

Sumber Data : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

Faktor pendorong meningkatnya persentase peningkatan target pajak daerah adalah Pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara online melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB, dilakukannya pemutakhiran data objek pajak daerah, dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru. Selain itu beberapa pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbagai pihak sehingga penerimaan pajak tidak bisa dipastikan. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah target pajak daerah.

Untuk tahun 2025, indikator ini tercapai sebesar 76,62% dari target sebesar 9%. Artinya indikator ini capainnya berstatus sangat tinggi. Adapun kenaikan yang terjadi secara signifikan ini disebabkan karena adanya jenis pajak daerah baru, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 127 Peraturan Daerah tersebut di atas diterangkan bahwa ketentuan mengenai opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

i. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

Waktu

Terhadap pajak yang bersifat *official assessment* maka BPKPAD wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPKPAD sebagai dasar pemungutan

pajak daerah, SKPD yang diterbitkan meliputi :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- d. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; dan
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang digunakan untuk transaksi pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB. (Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011).

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan stan dan pelayanan publik yang ada. Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari

proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai dimasukkan dalam aplikasi SIAP PAKDE secara *online*, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsur bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPM, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketetapan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara membagi jumlah SKPD yang diterbitkan dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%.

Adapun Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 26
Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2020-2025

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah SKPD yang diterbitkan	1.197	2.346	1.886	1.802	2111	947

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah permohonan/ pengajuan SKPD	1.197	2.346	1.886	1.802	2111	947
3.	Persentase(%)	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan (SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan oleh wajib pajak. Salah satu faktor pendorong tercapainya target kinerja pada indikator ini adalah tersedianya sistem aplikasi SIAP PAKDE sebagai alat untuk mengolah data pengajuan SKPD reklame dan air tanah dan meningkatnya kesadaran WP badan (*vendor*) reklame.

Namun terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu antara lain masih ditemukan perbedaan antara izin reklame yang diterbitkan oleh DPM dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan dengan melakukan koordinasi dengan DPM dan Satpol PP terkait penyelenggaraan reklame agar tercipta sinkronisasi antara pajak dan izin reklame, dan dapat diketahui reklame yang telah terpasang namun belum berizin dan belum bayar pajak.

Tabel 2. 27
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2025

No	Jenis Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jml
1.	Air Tanah	61	61	61	61	62	62	368
2.	Reklame	41	34	164	91	222	27	579
Jumlah		102	95	225	152	284	89	947

Sumber Data : BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

j. **Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pajak daerah berasal dari penerimaan 11 (Sebelas) jenis pajak daerah yaitu pajak reklame, pajak air tanah, PBB-P2, BPHTB, PBJT Hotel, PBJT Makanan dan Minuman, PBJT

Tenaga Listrik, PBJT Hotel, PBJT Penyediaan Parkir, PBJT Kesenian dan Hiburan, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Realisasi penerimaan pajak daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.

Untuk memperoleh angka persentase realisasi pajak daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pajak daerah dikali 100%. Adapun Persentase realisasi terhadap target pendapatan Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel 2.29 :

Tabel 2. 28
Persentase Realisasi terhadap target Pajak Daerah tahun 2020-2025 triwulan II

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi Pajak Daerah	47.887.604.813	52.832.020.942	74.191.559.232	79.677.967.921	76.926.746.042	52.238.282.602
Target Pajak Daerah	36.723.000.000	45.834.000.000	69.760.000.000	74.947.290.400	78.370.855.400	138.418.634.896
Persentase Realisasi Pajak Daerah	130,40	115,27	106,35	106,31	98,16%	37,74%

Sumber: LRA 2023 Kab. Temanggung (per 5 Januari 2024)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 mencapai 37,74%. Realisasi dapat dikatakan belum optimal, hal ini terjadi karena penyetoran pajak yang masuk sampai dengan 30 Juni 2025 bersumber dari pembayaran pajak rutin baik *official* maupun *self assessment*. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan faktor penghambat adalah pendaftaran dan pembayaran objek BPHTB belum maksimal. PBJT Makanan dan/atau Minuman terdiri dari PBJT Restoran dan PBJT Penyedia Jasa Boga/Katering, sampai dengan triwulan II realisasi PBJT Penyedia Jasa Boga/Katering masih terbilang kecil karena belanja makan minum pada Dinas dan Sekolah di Kabupaten Temanggung masih sedikit. Selain itu, dengan adanya Opsen PKB dan BBNKB sebagai salah satu komponen pajak daerah juga menyebabkan persentase realisasi terlihat kecil mengingat target Opsen yang begitu besar tetapi realisasi yang masih sedikit. Faktor pendorong untuk meningkatkan Pajak Daerah terdiri dari upaya yang terus dilakukan dengan melaksanakan intensifikasi penagihan pajak daerah sehingga realisasi melampaui target.

Tabel 2. 29
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 Triwulan II

Pajak	Target	Realisasi	
		Triwulan I	Triwulan II
1. Hotel	425.000.000	115.114.613	121.737.497
2. Restoran	4.000.000.000	509.946.564	1.172.642.000
3. Hiburan	95.000.000	27.528.310	48.047.560
4. Reklame	1.000.000.000	186.295.160	228.735.119
5. PJU	24.000.000.000	6.280.534.606	5.402.257.482
6. Parkir	160.000.000	29.054.340	42.845.650
7. Air Tanah	360.000.000	99.766.920	112.527.640
8. PBB-P2	28.000.000.000	130.079.425	4.228.926.601
9. BPHTB	18.500.000.000	2.085.957.589	7.595.498.026
10. Opsen PKB	44.057.530.355	6.615.878.000	11.432.235.000

Sumber : BPKPAD Kab Temanggung, 2025

k. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban OPD pemungut pendapatan yang dikirimkan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 3 bulan berikutnya (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2024) untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPKPAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester, dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi Pajak Daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Adapun persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30
Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2020-2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu	14	13	11	18	34	31
jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan	14	13	11	18	34	31

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPKPAD , 2023

Tahun 2025 jumlah OPD pengelola pendapatan sebanyak 31 OPD, dibanding dengan tahun 2024 sebanyak 34 jumlahnya menurun 3 OPD yaitu dari Kelurahan-Kelurahan yang memiliki anggaran pendapatan 2024 tidak lagi muncul pada APBD Penetapan 2025 seperti Kelurahan Kowangan, Purworejo, dan Kranggan. Pendapatan yang masuk dalam anggaran pendapatan kelurahan 2025 adalah Penyewaan Tanah dan Retribusi Pemakaian Ruangan.

Tingkat kesadaran perangkat daerah dalam melaporkan capaian pendapatan terbilang tinggi, disamping itu peran serta dari petugas dalam mengingatkan tentang kewajiban pelaporan pendapatan juga menjadi faktor pendukung suksesnya indikator ini.

Sedangkan faktor penghambat yang mungkin terjadi karena pelaporan yang dilakukan tidak bisa diawal waktu, seringnya terjadi diatas tanggal 7 tiap awal bulannya. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di perangkat daerah terbatas dan bertumpuknya tugas yang lain membuat pelaporan tidak dapat dilakukan awal waktu sehingga terus dilakukan upaya mengingatkan kepada perangkat daerah tentang pentingnya melaporkan pendapatan yang sudah diperoleh tiap awal bulan, baik ketika ada rakor pimpinan maupun ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

Pelaporan Pengelola Pendapatan dilaksanakan tepat waktu oleh OPD pengelola pendapatan sesuai pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung. 31 OPD pengelola pendapatan tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 31
Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2024

NO	NAMA OPD	2025	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	–
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	√	–
3	Dinas Kesehatan	√	–
4	Dinas Perhubungan	√	–
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	√	–

NO	NAMA OPD	2025	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
6	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	√	–
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	√	–
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	√	–
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	–
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√	–
11	Bagian Umum	√	–
12	Kecamatan Temanggung	√	–
13	Kecamatan Kaloran	√	–
14	Kecamatan Pringsurat	√	–
15	Kecamatan Parakan	√	–
16	Kelurahan Banyuurip	√	–
17	Kelurahan Butuh	√	–
18	Kelurahan Giyanti	√	–
19	Kelurahan Jampirejo	√	–
20	Kelurahan Jampiroso	√	–
21	Kelurahan Jurang	√	–
22	Kelurahan Kebonsari	√	–
23	Kelurahan Kertosari	√	–
24	Kelurahan Kowangan	√	–
25	Kelurahan Kranggan	√	–
26	Kelurahan Madureso	√	–
27	Kelurahan Manding	√	–
28	Kelurahan Mungseng	√	–
29	Kelurahan Parakan Kauman	√	–
30	Kelurahan Parakan Wetan	√	–
31	Kelurahan Purworejo	√	–
32	Kelurahan Sidorejo	√	–
33	Kelurahan Temanggung II	√	–
34	Kelurahan Tlogorejo	√	–

Sumber : BPPKAD Kab.Temanggung

Data Tambahan :
Persentasi Tanah Pemda Yang Bersertifikat

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah. Tujuan pensertifikatan Tanah adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah.

- b. Memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Atas Tanah.
- c. Melaksanakan tertib administrasi Barang Milik Daerah berupa tanah.
- d. Mengamankan Barang Milik Daerah berupa tanah.

Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat di hitung dengan rumus: jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dibagi jumlah Tanah Pemda dikali 100%.

Adapun Persentase Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 32
Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat Tahun 2019-2024 Triwulan II

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	1366	1455	1799	2194	2.325	2.339
Jumlah Tanah Pemda	2861	2865	2872	2919	2.918	2.918
Persentase (%)	47,74	50,78	62,63	75,16	79,67	80,16

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2023

adapun jumlah pensertifikatan tanah pemda di tahun 2025 triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.34
Persertifikatan Tanah Pemda Tahun 2025 Triwulan II

Uraian	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Jumlah
Jumlah Sertifikat tanah yang terbit	-	14	-	-	-	-	14

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2023

Pada tahun 2025 telah terbit 39 sertifikat, atas 39 sertifikat tersebut menambah 14 bidang tanah Pemda yang tadinya belum bersertifikat dan hal ini mengalami peningkatan jumlah tanah yang bersertifikat menjadi sebanyak 2.339 bidang, sehingga dibanding tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,49%.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari 11 Indikator kinerja program, terdapat 1 Indikator yang belum mencapai target 100% Antara lain :
 - a. Indikator persentase realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi kinerja 37,74% dari target 95,5% dan capainnya sebesar 39,52%. Realisasi masih rendah dikarenakan :
 - pendaftaran dan pembayaran objek pajak Reklame dan BPHTB belum maksimal serta capaian pada triwulan II belum menggambarkan keseluruhan realisasi Pajak Daerah dan akan tercapai pada triwulan IV.
 - PBB-P2 belum jatuh tempo sehingga realisasi dari PBB-P2 belum maksimal
 - Rekomendasi Tindak Lanjut : rutin melakukan sosialisasi tentang pajak daerah menggunakan beberapa platform digital yang tersedia.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah antara lain :
 - a. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak daerah.
 - b. Digitalisasi Pelayanan yang Belum Merata
Meskipun implementasi pembayaran digital menunjukkan tren positif, infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang masih terbatas serta minat dan kemampuan masyarakat untuk bertransaksi non-tunai yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kurang optimalnya Pengelolaan BMD
 - d. Petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas untuk melaksanakan pendataan objek pajak sehingga kurang maksimalnya sosialisasi mengenai pendaftaran objek baru PBB-P2.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.34 berikut:

Tabel 2. 33
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal		
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	
keuangan				
Total Program dan Kegiatan				409.891.193.744
1	Program pengelolaan Keuangan daerah			408.945.974.500
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100%	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	
		Persentase Penerbitan SP2D online yang tepat Waktu	100%	
		Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100%	
		Penyampaian LKPD yang tepat waktu	100%	
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun, Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun, Jumlah Dokumen Raperda tentang APBD yang disusun, Jumlah Dokumen Raperda tentang Perubahan APBD yang disusun	100%	261.810.500

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Penetapan		
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	
			409.891.193.744
Program pengelolaan Keuangan daerah			408.945.974.500
	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100%	
	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	
	Persentase Penerbitan SP2D online yang tepat Waktu	100%	
	Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100%	
	Penyampaian LKPD yang tepat waktu	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun, Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun, Jumlah Dokumen Raperda tentang APBD yang disusun, Jumlah Dokumen Raperda tentang Perubahan APBD yang disusun	100%	261.810.500

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal		
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	
keuangan				
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	24.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	17.500.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	122.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	98.310.500
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan perbendaharaan daerah, Jumlah SP2D yang diterbitkan	100%	225.000.000
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4000 Dokumen	225.000.000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Penetapan		
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	24.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	17.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	122.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	98.310.500
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan perbendaharaan daerah, Jumlah SP2D yang diterbitkan	100%	225.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4000 Dokumen	225.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal		
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	
keuangan				
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD, Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	323.500.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	196.500.000
2	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1236 Orang	127.000.000
d	Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah terlayannya Pencairan bantuan keuangan	100%	408.135.664.000
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	393.423.070.000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Penetapan		
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD, Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	323.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	196.500.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1236 Orang	127.000.000
Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah terlayannya Pencairan bantuan keuangan		408.135.664.000
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	393.423.070.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal		
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	
keuangan				
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1.000.000.000
3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	13.712.594.000
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		0	423.000.000
		penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100%	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	85%	
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Barang Milik Daerah, Jumlah standar harga yang disusun, Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100%	423.000.000
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	10.500.000
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236 Dokumen	365.000.000
3	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	600 Dokumen	47.500.000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Penetapan		
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1.000.000.000
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	13.712.594.000
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		0	423.000.000
	penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100%	
	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	85%	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Barang Milik Daerah, Jumlah standar harga yang disusun, Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100%	423.000.000
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	10.500.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236 Dokumen	365.000.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	600 Dokumen	47.500.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal		
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	
keuangan				
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			522.219.244
		Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	10%	
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%	
		Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	96%	
		Persentase Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	100%	
a	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah, Jumlah realisasi pendapatan asli daerah, Jumlah Obyek Pajak yang terdata, Jumlah SPPT yang Terbit	100%	522.219.244
1	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis Pajak Daerah	4 Dokumen	192.219.244
		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	90.400.000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Penetapan		
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			522.219.244
	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daera	10%	
	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%	
	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	96%	
	Persentase Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	100%	
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah, Jumlah realisasi pendapatan asli daerah, Jumlah Obyek Pajak yang terdata, Jumlah SPPT yang Terbit	100%	522.219.244
Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis Pajak Daerah	4 Dokumen	192.219.244
	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	90.400.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal		
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	
keuangan				
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	196.600.000
4	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	18.000.000
5	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	25.000.000
EX BAU :				
d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			23.618.571.604
		IKM Perangkat Daerah	86.87%	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,90%	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tersedia	100%	22.380.891.785
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8036 orang/bulan	22.380.891.785

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Penetapan		
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	196.600.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	18.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	25.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			23.618.571.604
	IKM Perangkat Daerah	86,87%	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,90%	
Administrasi Keuangan	jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tersedia	100%	22.380.891.785
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8036 orang/bulan	22.380.891.785

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal		
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	
keuangan				
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah	100%	126.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.000.000
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	25.000.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	52.000.000
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	726.863.619
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	215.000.000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Penetapan		
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah	100%	126.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	25.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	52.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	726.863.619
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	215.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal		
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	
keuangan				
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	511.863.619
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	384.816.200
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	90.316.200
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	242.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10.000.000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Penetapan		
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	511.863.619
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	384.816.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	90.316.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	242.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal		
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	
keuangan				
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.500.000
TOTAL ANGGARAN				433.509.765.348

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Penetapan		
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
	Indikator Kinerja	Target	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.500.000
			433.509.765.348

2.6. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam ketersediaan anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2. 34
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	N i h i l				

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 5 beberapa Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 35
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2022

no	NAMA INOVASI	PIHAK YANG TERLIBAT	URAIAN INOVASI	TAHUN PEMBUATAN	RUANG LINGKUP
1	E-PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH	RSUD, PUSKESMAS dan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan	Sistem informasi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan pendapatan BLUD yang terpusat dan terstruktur sehingga dapat menghasilkan suatu format laporan yang seragam yang secara otomatis mampu dihasilkan dari aplikasi berdasarkan data pendapatan yang	2022	Inovasi Penatausahaan Pendapatan

no	NAMA INOVASI	PIHAK YANG TERLIBAT	URAIAN INOVASI	TAHUN PEMBUATAN	RUANG LINGKUP
			dimasukkan. aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi SIAPPAKDE yang sudah ada sebelumnya terkait pengelolaan pajak dan retribusi yang secara otomatis terbentuk laporan penatausahaannya.		
3	E-PERSEDIAAN	SEMUA OPD	Sistem informasi akuntansi persediaan, yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi persediaan yang sudah menggunakan metode FIFO dan FEFO yang bertujuan agar penatausahaan persediaan akuntabel, mudah diakses dimanapun dan kapanpun	2022	Inovasi Pelayanan Pemerintah

2.8. Penghargaan

Dari tahun 2012 – 2024. Kabupaten Temanggung mendapat penghargaan WTP 13 tahun berturut dari BPK. Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 36
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	OPINI WTP yang ke 8	BPK	Nasional	BPKPAD
2	OPINI WTP yang ke 9	BPK	Nasional	BPKPAD
3	OPINI WTP yang ke 10	BPK	Nasional	BPKPAD
5	OPINI WTP 10 tahun berturut -turut	BPK	Nasional	BPKPAD
6	OPINI WTP yang ke 11	BPK	Nasional	BPKPAD
7	OPINI WTP yang ke 12	BPK	Nasional	BPKPAD
8	OPINI WTP yang ke 13	BPK	Nasional	BPKPAD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang dirumuskan dalam Renstra 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel”** dengan sasaran yang akan dicapai adalah **“Peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan :

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026

ON	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA 2026	Target kondisi 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	73,9	73,9
				IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,87	86,87
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,10	77,10
		Peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	%	20,17	20,17
				Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP
			Program Pengelolaan Keuangan	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	75	75
				Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100
				Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100
				Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100	100
				penyampaian LKPD yang tepat waktu	%	100	100

ON	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	Target kondisi
						2026	2026
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	%	100	100
				Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,25	98,25
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	4,57	4,57
				Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap target pajak daerah	%	98,16	98,16

Sumber : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2025-2029

Kebijakan dan strategi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung tahun 2026

RANCANGAN RENJA BPKPAD TAHUN 2026			RKPD BPKPAD TAHUN 2026			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Rp
1	Program pengelolaan Keuangan daerah	408.945.974.500,00	1	Program pengelolaan Keuangan daerah	408.945.974.500,00	-
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	261.810.500,00	A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	261.810.500,00	-
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24.000.000,00	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24.000.000,00	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.500.000,00	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.500.000,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	122.000.000,00	3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	122.000.000,00	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	98.310.500,00	4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	98.310.500,00	-
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	225.000.000,00	B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	225.000.000,00	-
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	225.000.000,00	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	225.000.000,00	-
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	323.500.000,00	C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	323.500.000,00	-
1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	196.500.000,00	1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	196.500.000,00	-

RANCANGAN RENJA BPKPAD TAHUN 2026			RKPD BPKPAD TAHUN 2026			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Rp
2	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	127.000.000,00	2	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	127.000.000,00	-
D	Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah	408.135.664.000,00	D	Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah	408.135.664.000,00	-
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	393.423.070.000	1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	393.423.070.000	0
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000	2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000	0
3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.712.594.000	3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.712.594.000	0
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	423.000.000,00	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	423.000.000,00	-
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	423.000.000,00	A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	423.000.000,00	-
1	Penyusunan Standar Harga	10.500.000,00	1	Penyusunan Standar Harga	10.500.000,00	-
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	365.000.000,00	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	365.000.000,00	-
3	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	47.500.000,00	3	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	47.500.000,00	-

RANCANGAN RENJA BPKPAD TAHUN 2026			RKPD BPKPAD TAHUN 2026			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Rp
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	522.219.244,00	3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	522.219.244,00	-
A	Pengelolaan Pendapatan Daerah	522.219.244,00	A	Pengelolaan Pendapatan Daerah	522.219.244,00	-
1	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	192.219.244,00	1	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	192.219.244,00	-
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	90.400.000,00	2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	90.400.000,00	-
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	196.600.000,00	3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	196.600.000,00	-
4	Penagihan Pajak Daerah	18.000.000,00	4	Penagihan Pajak Daerah	18.000.000,00	-
5	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	25.000.000,00	5	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	25.000.000,00	-
EX BAU :		23.618.571.604,00	EX BAU :		23.618.571.604,00	0
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.618.571.604,00	4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.618.571.604,00	-
A	Administrasi Keuangan	22.380.891.785,00	A	Administrasi Keuangan	22.380.891.785,00	-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.380.891.785,00	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.380.891.785,00	-

RANCANGAN RENJA BPKPAD TAHUN 2026			RKPD BPKPAD TAHUN 2026			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Rp
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.000.000,00	B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.000.000,00	-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	-
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	-
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.000.000,00	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.000.000,00	-
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.863.619,00	C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.863.619,00	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.000.000,00	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.000.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	511.863.619	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	511.863.619	-
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.816.200,00	D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.816.200,00	-

RANCANGAN RENJA BPKPAD TAHUN 2026			RKPD BPKPAD TAHUN 2026			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Rp
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.316.200,00	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.316.200,00	-
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	242.000.000	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	242.000.000	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.500.000,00	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.500.000,00	-
Total Program dan Kegiatan (tanpa Bankeu, Dana Darurat & DBH)		25.374.101.348	Total Program dan Kegiatan (tanpa Bankeu, Dana Darurat & DBH)		25.374.101.348	-
TOTAL ANGGARAN		433.509.765.348	TOTAL ANGGARAN		433.509.765.348	-

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan pagu antara rancangan renja dan RKPD Tahun 2025.

Tabel 4. 2

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Tahun 2026			Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju 2027
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah	
			Indikator Kinerja	Target					
keuangan									
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
KEUANGAN									
5.02.02	Program pengelolaan Keuangan daerah				408.945.974.500				409.026.414.000
			Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100%					
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%					
			Persentase Penerbitan SP2D online yang tepat Waktu	100%					
			Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100%					
			Penyampaian LKPD yang tepat waktu	100%					
5.02.02.201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun, Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun, Jumlah Dokumen Raperda tentang APBD yang disusun, Jumlah Dokumen Raperda tentang Perubahan APBD yang disusun	100%	261.810.500			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	287.400.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Tahun 2026			Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju 2027
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah	
			Indikator Kinerja	Target					
5.02.02.201.08	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	24.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	26.400.000
5.02.02.201.07	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	17.500.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	19.000.000
5.02.02.201.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	kab. Temanggung	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	122.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	134.000.000
5.02.02.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	kab. Temanggung	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	98.310.500	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	108.000.000
5.02.02.2-02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah dokumen hasil pengelolaan perbendaharaan daerah, Jumlah SP2D yang diterbitkan	100%	225.000.000			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	247.500.000
5.02.02.2-02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4000 Dokumen	225.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	247.500.000
5.02.02.2-03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD, Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	323.500.000			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	355.850.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Tahun 2026			Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju 2027
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah	
			Indikator Kinerja	Target					
5.02.02.2-03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	kab. Temanggung	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	196.500.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	216.150.000
5.02.02.2-03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	64 Orang	127.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	139.700.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah terlayannya Pencairan bantuan keuangan	100%	408.135.664.000			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	408.135.664.000
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	393.423.070.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	393.423.070.000
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	kab. Temanggung	jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1.000.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	1.000.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	13.712.594.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	13.712.594.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Tahun 2026			Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju 2027
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah	
			Indikator Kinerja	Target					
5.02.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			0	423.000.000				465.050.000
			penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100%					
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	85%					
5.02.03.2-03	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen hasil pengelolaan Barang Milik Daerah, Jumlah standar harga yang disusun, Jumlah BMD yang dimanfaatka	100%	423.000.000			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	465.050.000
5.02.03.2-03.01	Penyusunan Standar Harga	kab. Temanggung	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	10.500.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	11.550.000
5.02.03.2-03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236 Dokumen	365.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	401.500.000
5.02.03.2-03.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	600 Dokumen	47.500.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	52.000.000
5.02.04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				522.219.244				547.500.000
			Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daera	10%					
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%					

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Tahun 2026			Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju 2027
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah	
			Indikator Kinerja	Target					
			Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	96%					
			Persentase Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	100%					
5.02.04.2-01.	Pengelolaan Pendapatan Daerah		TJumlah Realisasi Pendapatan Daerah, Jumlah realisasi pendapatan asli daerah, Jumlah Obyek Pajak yang terdata, Jumlah SPPT yang Terbit	100%	522.219.244			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	547.500.000
5.02.04.2.01.02	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	192.219.244	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	200.000.000
						DAU			
5.02.04.2-01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	90.400.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	100.000.000
5.02.04.2-01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	196.600.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	200.000.000
5.02.04.2-01.11	Penagihan Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	18.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	20.000.000
5.02.04.2-01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	25.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	27.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Tahun 2026			Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju 2027
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah	
			Indikator Kinerja	Target					
EX BAU :									
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		23.618.571.604				23.526.139.586
			IKM Perangkat Daerah	86,87					
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	77,10					
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tersedia	100%	22.380.891.785			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	22.380.891.785
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8036 orang/bulan	22.380.891.785	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	22.380.891.785
5.02.01.2-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah	100%	126.000.000			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	138.600.000
5.02.01.2-06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	11.000.000
5.02.01.2-06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	33.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Tahun 2026			Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju 2027
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah	
			Indikator Kinerja	Target					
5.02.01.2-06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	9.900.000
5.02.01.2-06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	25.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	27.500.000
5.02.01.2-06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	52.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	57.200.000
5.02.01.2-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	726.863.619			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	799.549.981
5.02.01.2-08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	0
5.02.01.2-08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	215.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	236.500.000
5.02.01.2-08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	511.863.619	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	563.049.981

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Tahun 2026			Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju 2027
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah	
			Indikator Kinerja	Target					
5.02.01.2-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	384.816.200			Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	207.097.820
5.02.01.2-09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	90.316.200	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	99.347.820
5.02.01.2-09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	242.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	50.000.000
5.02.01.2-09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10.000.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	11.000.000
5.02.01.2-09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.500.000	DAU		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif, Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	46.750.000
Total Program dan Kegiatan (tanpa Bankeu, Dana Darurat & DBH)					25.374.101.348				25.429.439.586
TOTAL ANGGARAN					433.509.765.348				433.565.103.586

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, Tantangan, peluang, Hambatan, dan kekuatan yang dimiliki maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Realisasi belanja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar Rp 425.453.919.079,00 dari total anggaran Rp 428.777.230.407,00 Hal ini dikarenakan tidak ada realisasi Belanja tak terduga/penyerapan 0% dan belanja transfer/bantuan keuangan terserap 99.83%. Belanja tak terduga dan belanja transfer tidak dapat diukur capaian kinerjanya karena pengampu kegiatan dari beberapa OPD (DPUPR, DPRKPLH, Dinpermades, Dindikpora, Dishub, DKP3, Dinpusip, Dinhub dan BPKPAD (Dana Insentif Desa). Sedangkan peran BPKPAD hanya dari sisi anggaran dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah kelengkapan SPJ diverifikasi oleh OPD pengampu, maka anggarannya bukan menjadi pendukung indikator sasaran.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka capaian anggaran untuk Program dan kegiatan dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri terdiri dari Realisasi belanja program sebanyak Rp.18.519.186.890,00 terhadap anggaran SKPD sebanyak Rp.22.236.883.282,00 atau 83,28% dalam 1 (satu).

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah terdiri dari 4 Program antara lain Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Rp. 433.509.765.348,00 yang terdiri dari :

- Belanja Program Kegiatan sebesar Rp. 25.374.101.348,00 yang terdiri dari Program pengelolaan Keuangan daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
- Belanja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan keuangan, Dana Darurat dan mendesak, dan Dana Bagi Hasil) sebesar Rp. 408.135.664.000,00.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan. atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025
KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRIWINARNO, SE, MM
Pembina Utama muda
NIP 197310201999031005